

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mansyur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri. 2007. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham dalam masyarakat*. Ghalia Indonesia. Bogor Selatan.
- Adami Chazawi. 2017. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan ke-2. Rajawali Pers. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. RajaGrafindo. Persada.
- Artidjo Alkostar. 2008. *Korupsi Politik Di Negara Modern*. UII Pres. Yogyakarta.
- B. Herry Priyono. 2018. *Korupsi melacak Arti, Menyimak Implikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bibit S. Rianto. 2009. *Koruptor Go To Hell*. Mizan Publica. Bandung.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ellydar Chaidar. 2015. *Hukum dan Teori Konstitusi*. UII Press. Yogyakarta.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Malang.
- Jimly Ashhiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Kartini Kartono. 2017. *Patologi Sosial*. RajaGrafindo Persada. Depok.

- Leden Marpaung. 1992. *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2010. *Pengantar Filsafat Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Masyhur Effendi. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Galia Indonesia. Bogor.
- Mashood A. Baderin. 2003. *International Human Rights and Islamic Law*. diterjemahkan oleh Musa Kasim dan Edwin Arifin. 2010. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Muhammad Ashri. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, Dan Instrumen Dasar*. Social Politic Genius. Makassar.
- Miriam Budiardjo. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mirza Nasution. 2004. *Negara dan Konstitusi*. USU digital Library. Sumatera Utara.
- M Lubis dan J.C. Scott. 1997. *Korupsi Politik*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Tata Negara. Jakarta.
- M. Prodjohamididjoyo. 2001. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Nomensen Sinamo. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jala Pertama Aksara. Jakarta.
- Nur Basuki Winanmo. 2008. *Penyalahgunaan Kewenangan dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media. Jakarta.

- Philipus M Hadjon dkk. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi*. UGM Press. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ruslang Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Kencana. Jakarta.
- Rusma Dwiwana. 2016. *Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and Balance System*. Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara. Jakarta.
- Rozali Abdullah dan Syamsir. 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nubaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Rajawali Pers Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- , 2014. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sidikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media. Jakarta.

Karya Ilmiah

- Ateng Syafruddin. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab". Jurnal Pro Justicia Edisi IV. Universitas Parahyangan. Bandung.
- Lilis Eka Lestari, Ridwan Arifin, *Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, JURNAL PENELITIAN, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Volume 5 No. 2, Agustus 2019.

M. Laica Marzuki, "Konstitusi dan Konstitusionalisme", Jurnal Konstitusi, Vol. 7, Nomor 4 Agustus 2010, hlm. 4

Muhammad Yusril Yusuf, 2020, 'Kewenangan Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberian Izin Penyadapan, Penggeledahan dan/atau Penyitaan', Universitas Hasanuddin, Makassar.

Retno Kusniati. Makalah: "Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum", Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jambi, 24 Mei 2011.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Tigor Einstein, Ahmad Ramzy, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum, Volume 3 No.2, September 2020.

Tim Pengkajian Hukum dan HAM, 2007, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Departemen Hukum Dan HAM BPHN.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 2017, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultur Right*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan
Internasional Covenant on Civil and Political Right

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

Internet

Jimly Asshiddiqie, Makalah: "Penegakan Hukum", <http://www.jimly.com>, diakses pada 30 Desember 2020.

Saiful Anam, 2017, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, Diakses tanggal 10 September 2020, <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

Sovia Hasanah, "Gelar Perkara dan Seluk Beluknya" (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt582d807d2f16c/gelar-perkara-dan-seluk-beluknya/>, Diakses Pada 22 oktober 2020)

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/09354491/rangkuman-putusan-mk-soal-uu-kpk-3-perkara-ditolak-3-tak-diterima-1?page=all>, Diakses Pada 5 Mei 2022 Pada Pukul 14:14 Wita